



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUKAMTO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. PONCO HARTANTO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, 15 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TENGAH

(Dr. PONCO HARTANTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SALATIGA

(SUKAMTO, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
2	Meningkatnya efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	84%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	84%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	76
		Nilai Kinerja Anggaran	90

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.084.184.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 22.279.171.000
Jumlah		Rp 23.363.355.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Salatiga, 15 Januari 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TENGAH

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SALATIGA



(Dr. PONCO HARTANTO, S.H., M.H)



(SUKAMTO, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAMLAH HASYIM PAREMA, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI
SALATIGA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUKAMTO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA,

(SUKAMTO, S.H. M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(RAMLAH HASYIM PAREMA, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93 %
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	90 %
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara	90 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker	86 %

No	Kegiatan	Anggaran
1	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	9.328.013.000
2	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	12.940.000.000
Jumlah		22.268.013.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA,



(SUKAMTO, S.H. M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



(RAMLAH HASYIM PAREMA, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERWIN RIONALDY KOLOWAY, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUKAMTO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SALATIGA

(SUKAMTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

(ERWIN RIONALDY KOLOWAY, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	-
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	-
3	Meningkatnya pelaksanaan	Persentase pelaksanaan Operasi	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	100%
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	100%
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	-
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	100%
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	40.000.000
2	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	58.008.000
3	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	20.000.000
4	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	38.976.000
5	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	52.400.000
Jumlah		209.384.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SALATIGA.



(SUKAMTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKS INTELIJEN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erwin', is written over the text 'KEPALA SEKS INTELIJEN'.

(ERWIN RIONALDY KOLOWAY, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARDHANA RISWATI PRIHANTINI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN
NEGERI SALATIGA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUKAMTO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SALATIGA, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SALATIGA,



(SUKAMTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(ARDHANA RISWATI PRIHANTINI, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	50%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	90%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	85%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	90%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	240.790.000
2	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	19.000.000
3	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	7.720.000
Jumlah		267.510.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SALATIGA,



(SUKAMTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(ARDHANA RISWATI PRIHANTINI, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIMAZ ATMADI BRATA ANANDIANSYAH, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN
NEGERI SALATIGA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUKAMTO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SALATIGA,



(SUKAMTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,

(DIMAZ ATMADI BRATA A., S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	100%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	100%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	3%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	50%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	50%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	50%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	92.082.000
2	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	206.000.000
	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	141.728.000

Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	11.080.000
Jumlah	450.890.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SALATIGA,



(SUKAMTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,

(DIMAZ ATMADI BRATA A., S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NANA ROSITA SARI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUKAMTO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SALATIGA,

(SUKAMTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,


(NANA ROSITA SARI, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	100%
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100%
2	Meningkatnya pengembalian kerugian	Persentase pengembalian kerugian	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	keuangan Negara melalui jalur perdata	negara melalui jalur perdata	
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	100%
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pertimbangan Hukum/Penampungan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Negeri	13.048.000
2	Sidang Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	22.652.000
3	Pengelolaan HALO JPN di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	2.220.000
4	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	5.980.000
Jumlah		43.900.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SALATIGA,



(SUKAMTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

(NANA ROSITA SARI, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IMAM RAHMAT SAPUTRA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN
BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUKAMTO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SALATIGA,



(SUKAMTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,

(IMAM RAHMAT SAPUTRA, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	100%
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	100%
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan	52.400.000
2	Pemusnahan	14.600.000
3	Penyelesaian	33.000.000
Jumlah		100.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SALATIGA,



(SUKAMTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,

(IMAM RAHMAT SAPUTRA, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IMAM SHOIFIS THOHRI, A.Md.
Jabatan : KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN,
KEUANGAN, DAN PNB

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAMLAH HASYIM PAREMA, S.H.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN,

(RAMLAH HASYIM PAREMA, S.H.)

Pihak Pertama,

KAUR TUPEG, KEUANGAN & PNB,

(IMAM SHOIFIS THOHRI, A.Md.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, DAN PNBP

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Terlaksananya realisasi anggaran pada Kejaksaan Negeri Salatiga	92%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Terlaksananya pelayanan hukum kepada masyarakat	90%

No	Rincian Output
1	Terlaksananya tata kelola persuratan
2	Terlaksananya tata kelola kepegawaian
3	Mengkoordinir dan Mengadministrasi kegiatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah beserta aplikasinya
4	Mengkoordinir proses berjalannya pelayanan, baik dari PTSP

D. PRIORITAS NASIONAL

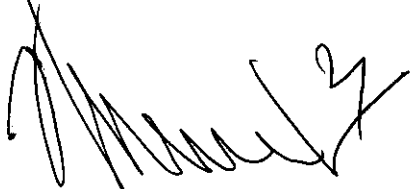
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN,



(RAMLAH HASYIM PAREMA, S.H.)

Pihak Pertama,

KAUR TUPEG, KEUANGAN & PNBP,



(IMAM SHOIFIS THOEHRI, A.Md.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ENDANG WIDIYANTI
Jabatan : KEPALA URUSAN PUSAT DATA STATISTIK KRIMINAL DAN
TEKNOLOGI INFORMASI & PERPUSTAKAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAMLAH HASYIM PAREMA, S.H.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN,

(RAMLAH HASYIM PAREMA, S.H.)

Pihak Pertama,

KAUR DASKRIMTI DAN
PERPUSTAKAAN,

(ENDANG WIDIYANTI)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA URUSAN PUSAT DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI
INFORMASI & PERPUSTAKAAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan dan Pelaporan Perpustakaan	tingkat kesesuaian Pengelolaan dan Pelaporan Perpustakaan yang tersusun sesuai	80-90 %
2	Terwujudnya Penglolaan Asset BMN berupa Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMN	tingkat kesesuaian Penglolaan Asset BMN berupa Pemindahtanganan dan	80-90 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Pemusnahan BMN yang tersusun sesuai regulasi yang berlaku	
3	Memonitoring data dalam rangka pembentukan dan pengembangan basis data, serta penyajian statistik kriminal maupun statistik lainnya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang penerapannya berbasis pada Sistem Informasi Manajemen	Persentase penyelesaian Monitoring data dan ketepatan waktu monitoring data	80-90 %
4	meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama dalam rangka pengelolaan data dan statistik kriminal maupun terhadap penerapan dan pengembangan teknologi informasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan Negeri Salatiga;	penyelesaian koordinasi dan hubungan kerjasama ketepatan waktu koordinasi dan hubungan kerjasama	80-90 %

No	Rincian Output
1	Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana san ketatausehaan dan mengelola keuangan rusanKetasnge Keag kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi
2	Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya
3	Pelaksanaan pengelolaan data dan stastistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri
4	Pelaksanaan pengelolaan data dan stastistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN,



(RAMLAH HASYIM PAREMA, S.H.)

Pihak Pertama,

KAUR DASKRIMTI DAN
PERPUSTAKAAN,



(ENDANG WIDIYANTI)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FRADITIO PERWIRA PRANANTAMA, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERWIN RIONALDY KOLOWAY, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

(ERWIN RIONALDY K., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI
INTELIJEN,

(FRADITIO PERWIRA P., S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI INTELIJEN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain	Persentase lembaga, pihak, atau bidang yang mendapatkan pengawalan dan pengamanan serta dukungan teknis intelijen	100 %

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Terlaksananya perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, instansi, dan organisasi	Persentase terselenggaranya koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemda, bumd, instansi, maupun organisasi	100 %
3	Terlaksananya pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis	Persentase dipenuhinya permintaan pengawalan dan pengamanan terhadap pemerintahan maupun pembangunan proyek yang bersifat strategis	100 %

No	Rincian Output
1	Tersedianya laporan hasil pengawalan dan pengawalan terhadap pemerintahan dan pembangunan
2	Tersedianya laporan administrasi intelijen

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

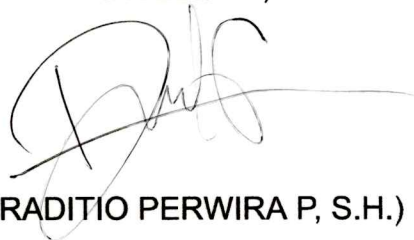
KEPALA SEKSI INTELIJEN,



(ERWIN RIONALDY K., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI
INTELIJEN,



(FRADITIO PERWIRA P, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIZKY NUR AMANDA, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERWIN RIONALDY KOLOWAY, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

(ERWIN RIONALDY K., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI
INTELIJEN,

(RIZKY NUR AMANDA, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI INTELIJEN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	100 %
2	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis Daerah (PSD)	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	100 %
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum melalui	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	100 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa		

No	Rincian Output
1	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan
2	Tersedianya laporan hasil kegiatan pengamanan pembangunan strategis

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,



(ERWIN RIONALDY K., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI INTELIJEN,



(RIZKY NUR AMANDA, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. BAYU AJI NUGROHO, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI,
EKSAMINASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARDHANA RISWATI PRIHANTINI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
UMUM,

(ARDHANA RISWATI P., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN,
EKSEKUSI & EKSAMINASI PADA SEKSI
T.PIDANA UMUM,

(M. BAYU AJI NUGROHO, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI, EKSAMINASI PADA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan. Dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan di wilayah hukum KN Salatiga	Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan antar instansi yang terkait dalam penyelesaian	100 %

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		penanganan perkara di wilayah hukum KN Salatiga	
		Persentase putusan pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa di wilayah hukum KN Salatiga	100 %
		Persentase berkas perkara tindak pidana umum sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) di wilayah hukum KN Salatiga	100 %

No	Rincian Output
1	Terlaksananya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan. Dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan di wilayah hukum KN Salatiga

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
UMUM,



(ARDHANA RISWATI P., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN,
EKSEKUSI & EKSAMINASI PADA SEKSI
T.PIDANA UMUM,



(M. BAYU AJI NUGROHO, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DESTA KURNIAWAN SURBAKTI, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARDHANA RISWATI PRIHANTINI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
UMUM,

(ARDHANA RISWATI P., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN
PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,

(DESTA KURNIAWAN SURBAKTI, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	50%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	90%

No	Rincian Output
1	Terlaksananya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan. Dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan di wilayah hukum KN Salatiga

D. PRIORITAS NASIONAL

-

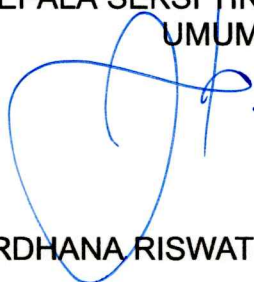
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

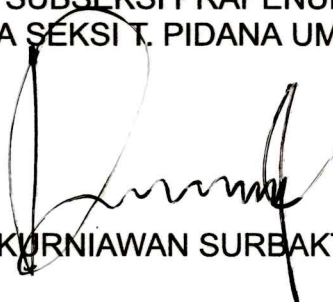
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
UMUM,



(ARDHANA RISWATI P., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN
PADA SEKSI T. PIDANA UMUM,



(DESTA KURNIAWAN SURBAKTI, S.H..)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WULAN PUSPA NUGRAHA, S.H.
Jabatan : Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi pada Kejaksaan Negeri Salatiga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIMAZ ATMADI BRATA A.,S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Salatiga

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, 28 Mei 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Salatiga,

(DIMAZ ATMADI BRATA A., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya
Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi pada
Kejaksaan Negeri Salatiga,

(WULAN PUSPA NUGRAHA,S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA & EKSEKUSI
PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	100 %
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	100 %
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan	50%

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	50%

No	Rincian Output
1	Tersedianya laporan hasil penyelesaian penanganan tindak pidana korupsi dan TPPU dari pengaduan masyarakat hingga tahap eksekusi

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Salatiga, 28 Mei 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Salatiga,

(DIMAZ ATMADI BRATA A., S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya
Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi pada
Kejaksaan Negeri Salatiga,

(WULAN PUSPA NUGRAHA, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI EKA SETYANTI, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Pengendalian Operasional
pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Salatiga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIMAZ ATMADI BRATA ANANDIANSYAH, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri
Salatiga

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,

(DIMAZ ATMADI BRATA
ANANDIANSYAH, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Sub Seksi Penyidikan dan
Pengendalian Operasional ,

(SITI EKA SETYANTI, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN & PENGENDALIAN OPERASI
PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100 %
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	100 %
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	100 %
		Persentase Perkara tindak pidana	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	100 %

No	Rincian Output
1	Tersedianya laporan hasil penyelesaian penanganan tindak pidana korupsi dan TPPU dari pengaduan masyarakat hingga tahap penuntutan

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Salatiga 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,

(DIMAZ ATMADI BRATA
ANANDIANSYAH, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Sub Seksi Penyidikan dan
Pengendalian Operasional ,

(SITI EKA SETYANTI, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DINAR AULIA KUSUMANINGRUM, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM PADA SEKSI
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NANA ROSITA SARI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN,

(NANA ROSITA SARI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN
HUKUM PADA SEKSI PERDATA & TUN,

(DINAR AULIA K., S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM
PADA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian Pertimbangan Hukum kepada Negara atau Pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum, kepatuhan hukum, tata kelola yang baik (<i>good governance</i>) dan pencegahan korupsi.	Persentase pemberian Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion/LO</i>) atas permasalahan hukum konkret di bidang hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara yang sedang atau akan dihadapi oleh Negara atau Pemerintah	100 %
		Persentase pemberian Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance/LA</i>) terhadap kegiatan	100 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		yang akan atau sedang dilaksanakan Negara atau Pemerintah dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara yang memiliki potensi timbulnya permasalahan hukum	
		Persentase pemberian Audit Hukum (<i>Legal Audit</i>) dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Negara atau Pemerintah melalui analisis dan penilaian kepatuhan dari aspek hukum perdata dan/atau administrasi negara	100 %
2	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian layanan Tindakan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah	Persentase kegiatan Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah	100 %
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Pelayanan Hukum dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat, membantu masyarakat atas akses terhadap hukum, mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sekaligus menerima pengaduan hukum dari masyarakat	Persentase pemberian konsultasi dan informasi di bidang hukum perdata atau tata usaha negara kepada masyarakat, baik perorangan atau badan hukum, yang diberikan secara lisan, tertulis, maupun melalui sistem elektronik	100 %

No	Rincian Output
1	Dalam pemberian Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion/LO</i>) output berupa Nota Pendapat Hukum/ <i>Legal Opinion</i> tertulis yang disusun berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap permasalahan yang dimohonkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum yang berkaitan, dan sumber hukum lainnya.
2	Dalam pemberian Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance/LA</i>), output berupa Notula dari Konsultasi Hukum secara lisan, Nota Pendapat, dan/atau memberikan Pendapat Hukum atas permasalahan hukum yang disampaikan oleh Pemohon setelah dilakukan ekspose atau dikonsultasikan kepada Kepala Satuan Kerja

3	Dalam pemberian Audit Hukum (<i>Legal Audit</i>), output berupa Laporan Audit Hukum tertulis yang memuat analisis kepatuhan peraturan perundang-undangan.
4	Dalam bertindak sebagai Fasilitator, Jaksa Pengacara Negara memfasilitasi pertemuan antara para pihak dan menyerahkan para pihak untuk merumuskan penyelesaian sengketa, yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
5	Dalam bertindak sebagai Mediator, Jaksa Pengacara Negara membantu tercapainya kesepakatan yang dibuat para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan atau Perjanjian Penyelesaian Sengketa oleh para pihak.
6	Dalam bertindak sebagai Konsiliator, Jaksa Pengacara Negara merumuskan kesepahaman awal dan identifikasi masalah. Jika tercapai kesepakatan dilanjutkan dengan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Sengketa oleh para pihak.
7	Pelayanan Hukum dilaksanakan dalam bentuk Laporan/Notula konsultasi hukum masyarakat baik terhadap konsultasi yang dilakukan secara lisan, tertulis, maupun elektronik.

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Salatiga, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN,



(NANA ROSITA SARI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN
HUKUM PADA SEKSI PERDATA & TUN,



(DINAR AULIA K., S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : THERESIA PINGKY WAHYU WINDARTI, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NANA ROSITA SARI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN,

(NANA ROSITA SARI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TUN,

(THERESIA PINGKY WAHYU W., S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri Salatiga	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100 %
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	100 %
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100 %

No	Rincian Output
1	Tersedianya laporan hasil penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Salatiga, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN,

KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TUN,



(NANA ROSITA SARI, S.H., M.H.)



(THERESIA PINGKY WAHYU W., S.H.)